

SI PINTAR

Sistem Pengendalian Informasi Melalui Notifikasi Satuan Kerja

- Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan
- Pemanfaatan dan peningkatan Sarana Prasarana, Teknologi Komunikasi dan Informasi
- Waktu mulai penerapan Inovasi : Februari 2017

RINGKASAN SINGKAT (SUMMARY)

- Inovasi diciptakan untuk membantu memberikan reminder kepada satker melalui notifikasi sms
- Layanan informasi ini merupakan bagian penting dari peningkatan layanan publik.
- Latar belakang diinisiasi inovasi tersebut adalah bahwa dalam survey kepuasan pengguna layanan pada KPPN Madiun, kemudahan memperoleh informasi merupakan salah satu layanan penting bagi satuan kerja.
- Berdasarkan survey kepuasan pengguna layanan KPPN Madiun pada tahun 2016, diperoleh capaian 4,37 dari skala 5. Capaian tersebut mengindikasikan masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan



A. ANALISIS MASALAH

Analisis permasalahan menggunakan Diagram Fishbone menggambarkan layanan informasi yang dilakukan pada KPPN Madiun selama ini belum dioptimalkan. Layanan informasi yang dilakukan belum dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi/terpadu, masih dilakukan oleh masing-masing seksi dan sub bagian umum. Layanan informasi yang dilakukan juga belum mendukung program less paper dalam rangka Perbendaharaan Goo Green. Informasi yang diberikan lebih sering sebatas permintaan satuan kerja (satker). Untuk memudahkan satuan kerja mendapatkan informasi yang diperlukan, perlu dioptimalkan layanan informasi yang ada. Layanan informasi dikelola secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung program less paper. Layanan informasi dirancang dapat menginformasikan kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo sehingga dapat meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang dilakukan satker seperti penyampaian data kontrak, penyampaian GUP atau PTUP, penyampaian SPM yang menggunakan RPD dll melalui SMS Gateway. Melalui sistem layanan informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan pada unitnya masing-masing. Dengan dilakukannya optimalisasi layanan informasi, diharapkan capaian indeks kepuasan pengguna layanan KPPN Madiun meningkat. Penyampaian informasi secara proaktif dan tepat sasaran diharapkan meningkatkan pula kepatuhan satuan kerja akan kewajibannya sebagai pengelola APBN. Dengan adanya inovasi layanan dengan menggunakan teknologi informasi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan KPPN Madiun dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

B. PENDEKATAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang diharapkan :

1. Meningkatnya kesadaran dan kompetensi pegawai KPPN Madiun untuk dapat memberikan layanan informasi secara optimal;
2. Terwujudnya aplikasi persuratan dihubungkan dengan sistem notifikasi untuk menginformasikan
 - (1) penyelesaian layanan kepada satker;
 - (2) reminder dalam kewajiban satker yang segera jatuh tempo.
3. Ditetapkannya kembali tim pengelola layanan informasi KPPN Madiun;
4. Tersusunnya alur kerja (SOP) layanan informasi KPPN Madiun.
5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Satuan Kerja Terhadap Layanan KPPN Madiun mencapai indeks 4,5 pada skala 5;
6. Meningkatnya kepatuhan satker terhadap kewajiban sebagai pengelola APBN
7. Terwujudnya Zona Integritas WBK/WBBM
8. Terwujudnya integrated information

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Aplikasi SIPINTAR yang merupakan aplikasi guna memberikan informasi kepada stakeholder melalui SMS Gateway ini ditempatkan pada masing-masing komputer pada semua Subbagian dan Seksi KPPN Madiun. Aplikasi tersebut menyediakan fitur layanan informasi tentang

- Pagu dan Realisasi Satker
- Modul LPJ Bendahara;
- Modul Komitmen;
- Modul Gaji;
- Modul Retur SP2D;
- Modul BAR;
- Modul UP/TUP/
- Modul SKPP;
- Modul Lainnya.

Aplikasi layanan informasi yang proaktif merupakan aplikasi persuratan yang dihubungkan dengan sistem SMS Gateway yang mengadopsi sistem SMS Banking untuk mengirimkan notifikasi berupa SMS kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing satuan kerja. Informasi yang disampaikan terkait dengan :

- Penyelesaian layanan yang telah dilakukan oleh petugas KPPN Madiun
- Kewajiban satuan kerja yang akan segera jatuh tempo, sebagai reminder atau alarm agar tidak terjadi keterlambatan melaksanakan kewajiban sebagai pengelola APBN

Aplikasi ini juga merupakan sarana monitoring dan evaluasi kinerja penyelesaian layanan kepada stakeholder masing-masing seksi dan sub bagian umum. Tahapan Pembangunan dimulai Februari 2017 oleh Tim Pengelolaan Layanan Informasi dengan tahapan merancang dan menyepakati pengelolaan layanan informasi yang terintegrasi, proaktif, dan mendukung program less paper. Tahapan selanjutnya dengan mengidentifikasi informasi dari masing-masing seksi dan sub bagian umum yang akan disampaikan dalam sistem layanan informasi kepada satuan kerja dan informasi yang akan dinotifikasikan melalui SMS kepada Satuan Kerja. Pengumpulan bahan informasi dari masing-masing seksi dan sub bagian umum yang akan diunggah pada aplikasi layanan informasi Pemasangan/ peng-install-an aplikasi. Pengadaan perangkat pendukung aplikasi dan atau upgrade perangkat yang sudah ada. Melakukan customize aplikasi (pengaturan ulang software aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)

Pemasangan atau peng-install-an aplikasi layanan informasi dan aplikasi persuratan serta SMSGateway, dengan tahapan :

- a. Pelatihan pengelolaan dan penggunaan aplikasi
- b. Melakukan uji coba penggunaan aplikasi
- c. Penyusunan alur kerja pengelolaan layanan informasi
- d. Pengunggahan informasi ke dalam aplikasi
- e. Melakukan uji coba kedua penggunaan aplikasi
- f. Penetapan keputusan penggunaan aplikasi

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI

Dengan menggunakan aplikasi Si Pintar memudahkan satuan kerja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, secara terintegrasi/terpadu dalam suatu sistem, bersifat proaktif, tepat sasaran, dan mendukung program less paper. Layanan informasi ini dirancang dapat menginformasikan kewajiban satuan kerja sebelum jatuh tempo sehingga dapat meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang lakukan satker seperti penyampaian data kontrak, penyampaian GUP atau PTUP, penyampaian SPM yang menggunakan RPD dll melalui SMS Gateway. Melalui sistem layanan informasi tersebut, pihak internal juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan pada unitnya masing-masing.

E. KEBERLANJUTAN

Aplikasi Si Pintar akan terus digunakan secara berkelanjutan, bahkan akan ditingkatkan kualitasnya, termasuk konten dan fitur-fiturnya.

LAPORAN INDEX INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah	: Provinsi Sumatera Barat
Nama Inovasi	: Nagari Mandiri Pangan
Bentuk Inovasi	: Tata Kelola
Inovasi Dimulai	: 01-Jan-2017
Latar Belakang	: Pada World Food Summit (1996), ketahanan pangan didefinisikan sebagai: "Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat".

Pengertian dari Nagari / Kelurahan Mandiri Pangan adalah Nagari/Kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Program Pengembangan Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat nagari/kelurahan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian rumah tangga dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui upaya :

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa.
3. Mengembangkan sistem ketahanan masyarakat nagari/Kelurahan (sosial, ekonomi, teknologi pangan)
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sasaran adalah penerima manfaat adalah rumah tangga yang tinggal di daerah rawan pangan yang merupakan titik – titik potensi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia sesuai dengan data FSVA pada 32 Nagari/kelurahan dari kabupaten/kota.

Program Pengembangan Nagari/ Kelurahan Mandiri Pangan dilaksanakan dalam waktu empat tahun melalui empat tahap, yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian. Melalui berbagai kegiatan di setiap tahap, akan memberikan dampak kemajuan pada kelompok afinitas di Nagari/kelurahan yang dibangun, adalah sebagai berikut:

1. **Tahap persiapan** tahun pertama, terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di wilayahnya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang dikelola oleh masyarakat untuk penguatan modal dan Pembentukan LKD sudah dapat berfungsi sebagai penyandang dana di desa.
2. **Tahap penumbuhan** tahun kedua, posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sudah bekerja; serta koordinasi program lintas subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan.
3. **Tahap pengembangan** tahun ketiga, sudah terdapat: kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
4. **Tahap kemandirian** tahun keempat, diharapkan perubahan mulai dari : Dinamika kelompok afinitas sudah meningkat, munculnya usaha kecil dan usaha mikro perdesaan di bidang pangan dan non pangan, tumbuhnya Gapoktan yang mandiri

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pendekatan berupa *pemberdayaan masyarakat* oleh semua lintas SKPD secara berkelanjutan dan terpadu sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat merubah pola pikir atau perubahan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan, *penguatan kelembagaan masyarakat berupaya* untuk meningkatkan kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif, Tim Pangan di Nagari/kelurahan (Walinagari/Lurah) yang merupakan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat Nagari/kelurahan, dan Lembaga Keuangan Nagari/Kelurahan (LKN/LKK) sebagai layanan usaha produktif di wilayah.

Pengembangan sistem ketahanan pangan diupayakan secara terpadu dengan menjalin koordinasi lintas`subsektor dan sector (Pertanian, peternakan, Perikanan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah.

Kegiatan Demapan merupakan: (1) salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di Nagari/kelurahan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan; (2) kegiatan lintas sektor

yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait; dan (3) wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari propinsi, dan kabupaten di Nagari.

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan : pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana nagari/kelurahan melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan pembinaan pada desa-desa pelaksana.

Perencanaan di tingkat desa dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluh, kelompok kerja kabupaten, dan pendamping sebagai fasilitator, serta Lembaga Pembangun Desa (LPD), Walinagari/Lurah dan Kaur Pembangunan, aparat, serta tokoh masyarakat lainnya.

Tujuan dan Manfaat : Tujuan :

Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang tinggal di nagari/kelurahan yang rentan/rawan pangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

Manfaat :

Penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat di Nagari/ kelurahan.

Hasil Inovasi : Meningkatnya kemampuan masyarakat nagari/kelurahan dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga.

Isian Indikator :

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	SK KADIS (SK KELTAN)
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	51-100 SDM	SK Tim Teknis NMP 2017,SK Tim pembina terpadu NMP 2017,SK Tim Pembina Terbadu NMP 2018
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah dilaksanakan	DPA

4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Pemerintah daerah Sering melakukan Bimtek inovasi daerah	Undangan Monev 2018,Undangan Sosialisasi 2017,Undangan apresiasi 2017
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah dilaksanakan pengembangan inovasi ke dalam Resntra	Renja, Renstra
7.	Jejaring Inovasi	Pemerintah daerah berjalan pada pemda dengan layanan publik	Undangan rapat dengan tim pembina terpadu
8.	Replikasi	Sering di replikasi	SK Replikasi tahun 2018 Kab/Kota
9.	Pedoman Teknis	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring	Panduan NMP,Cover grand design /roadmap,Kata Pengantar Grand design,Isi Grand design
10.	Pengelola Inovasi	Ditetapkan dengan SK OPD	SK TIM TEKNIS NMP 2017
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	ada ketersediaan informasi secara elektronik dan dapat diakses melalui daring (online)	ketersediaan informasi layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik	Penyelesaian layanan pengaduan

13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif serta kepastian akomodasi terhadap masukan dalam pengembangan inovasi daerah	SK Tim pembina terpadu NMP 2017,SK Tim Pembina Terpadu NMP 2018,MOU 1,MOU 2
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Terdapat layanan website/ email, aplikasi, Help Desk/front office, media social,	Kemudahan informasi layanan,Foto Front Office
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Sederhana	Kemudahan proses inovasi (SOP)
16.	Online Sistem	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik dan daring (online)	online sistem
17.	Kecepatan Inovasi	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah sangat cepat	kecepatan inovasi
18.	Kemanfaatan Inovasi	Banyak manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah	DPA
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	hasil pengukuran kepuasan pengguna tersedia dan dikatakan berkelanjutan	tingkat kepuasan 1,Tingkat kepuasan 2
20.	Sosialisasi Kebijakan	Sosialisasi melalui media cetak,elektronik, rapat	Und Sosialisasi 2017_001.jpg,Undangan Apresiasi 2017_001.jpg,Und Monev 2018_001.jpg
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas sangat baik , contoh kabupaten : Pesisir Selatan dan Pasaman Barat	Inovasi Nagari Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Barat